

PERBANASNews

No. 156 Tahun 2025 | Juli - September 2025



Injeksi Likuiditas Pemerintah ke Perbankan:

Peluang dan Tantangan Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Stephen Miran dan Arah
The Fed

Peran Strategis Bank dalam
Literasi Keuangan

Asa dari Menteri Purbaya

Fast Track Sektor Perumahan



PERBANASNews

No. 156 Tahun 2025
Juli - September 2025

PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(PERBANAS)

PELINDUNG

Badan Pengurus PERBANAS

REDAKSI

Anika Faisal
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza
Andry Asmoro
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

Redaksi menerima tulisan dari
pihak luar. Panjang tulisan
3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang
dalam/luar berwarna
• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

- 1 halaman: Rp4.000.000,00
- ½ halaman: Rp2.000.000,00

PERBANASNews menerima
pemasangan iklan dalam bentuk
laporan keuangan, display produk,
dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya PERBANAS Lantai 1
Jalan PERBANAS, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339
website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS

MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, PERBANAS News Edisi No. 156 Tahun 2025 telah terbit dengan tema besar **"Injeksi Likuiditas Pemerintah ke Perbankan: Peluang dan Tantangan dalam Pertumbuhan Ekonomi"**.

Edisi kali ini hadir di tengah momentum penting bagi perekonomian nasional yang sedang bertransformasi menuju babak baru. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan kebijakan strategis berupa injeksi likuiditas Rp200 triliun ke sektor perbankan nasional, langkah yang diharapkan menjadi katalis pemulihan ekonomi dan penggerak pembiayaan sektor riil. Kebijakan ini menjadi sorotan utama, tidak hanya karena skalanya yang besar, tetapi juga karena pesan strategis di baliknya: menegaskan peran perbankan sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

PERBANAS News mengangkat tema besar "Peluang dan Tantangan dalam Pertumbuhan Ekonomi", dengan menyoroti berbagai sisi dari kebijakan moneter dan fiskal terkini, baik di dalam maupun luar negeri. Mulai dari "Asa dari Menteri Purbaya", "Rezim Pelonggaran Moneter di Dalam Negeri", hingga "Berkomunikasi kepada Publik dengan Otentisitas untuk Membumikan Kebijakan Likuiditas yang merefleksikan dinamika kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan industri keuangan dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan.

Selain itu, kami juga mengulas peran strategis perbankan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sebuah pondasi penting di tengah percepatan digitalisasi dan inklusi keuangan nasional. Di sisi lain, artikel mengenai Fast Track Sektor Perumahan mengupas program pembangunan tiga juta rumah sebagai mesin ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rubrik kegiatan, PERBANAS menghadirkan sorotan PRIME 2025 dan CFO Forum PERBANAS II 2025, yang mempertegas komitmen asosiasi perbankan nasional dalam memfasilitasi diskusi strategis lintas pelaku industri keuangan, regulator, dan akademisi.

Kami berharap edisi ini dapat memberikan perspektif yang berimbang, inspiratif, dan reflektif terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan peran perbankan di dalamnya. Semoga sajian ini bermanfaat bagi pembaca dalam memahami lanskap ekonomi yang terus berubah serta tantangan yang menyertainya.

Selamat membaca!

PERBANAS UTAMA

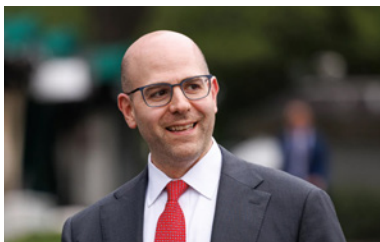
4 Asa dari Menteri Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan mengalihkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN.



8 Stephen Miran dan Arah The Fed

Miran secara resmi dilantik menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed. Dia menggantikan Adriana Kugler, dan akan menyelesaikan sisa masa jabatan pendahulunya hingga 31 Januari 2026.



11 Rezim Pelonggaran Moneter di Dalam Negeri

Di hari yang sama dengan pengumuman Federal Open Market Committee (FOMC), Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin ke posisi 4,75%.

13 Peran Strategis Bank dalam Literasi Keuangan

Di tengah pesatnya perkembangan inovasi teknologi di sektor finansial, literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi sebuah negara.



17 Fast Track Sektor Perumahan

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan. Program prioritas itu dituangkan melalui pembangunan 3 juta rumah.



ARTIKEL PERBANAS

Berkomunikasi kepada Publik dengan Otentisitas untuk Membumikan Kebijakan Likuiditas 21

Menavigasi Arah Purbayanomics: Injeksi Rp200 Triliun ke Perbankan 23

Jalan Panjang dari Injeksi ke Investasi: Mendorong Peran Nyata Perbankan 26

KEGIATAN

PRIME 2025 Navigating Economic Headwinds: Responding to Weakening Consumption 27

PERBANAS Talkshow Perbankan dan Investasi: Sinergi untuk Masa Depan Keuangan Indonesia 28

CFO Forum PERBANAS II 2025 29

SUPLEMEN

Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Bank of China 9



Photo : Detik.com

Asa dari Menteri Purbaya

Dua hari setelah dilantik menjadi anggota Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan mengalihkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN. Ada lima bank pelat merah yang menerima guyuran dana pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp10 triliun.

Langkah itu diambil dengan maksud untuk mengakselerasi pergerakan ekonomi melalui penyaluran kredit bank ke sektor-sektor riil yang membutuhkan. Diharapkan, dengan adanya tambahan likuiditas tersebut, perbankan lebih leluasa menyalurkan

pembiayaan karena memperoleh dana murah yang merupakan "deposito" pemerintah. Menkeu melarang bank menempatkan dana tersebut untuk membeli surat berharga pemerintah.

"Ini pergeseran kas negara dengan fungsi mengaktifkan sistem likuiditas perbankan agar mesin ekonomi bisa berjalan Kembali," ujar Purbaya saat mengumumkan gebrakan awalnya di hadapan Komisi XI DPR, Rabu, 10 September lalu. Dana Rp200 triliun yang dialihkan ke bank tersebut adalah sebagian dari jumlah simpanan pemerintah di BI yang senilai Rp425 triliun.

Dengan tambahan likuiditas tersebut, perbankan, khususnya bank-bank Hibrida, memiliki lebih banyak dana untuk dikelola. Bank pun bisa menekan "cost of fund" sehingga

bunga kredit bisa lebih murah, dan pada gilirannya berpotensi meningkatkan permintaan pembiayaan dari sektor riil. Sektor-sektor yang diharapkan bisa menikmati tambahan adalah sektor UMKM dan sektor prioritas nasional.

Multiplier Effect ke Ekonomi

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah melalui otoritas moneter dan fiskal kerap menempuh kebijakan ekspansif. Penambahan likuiditas Rp200 triliun ini adalah salah satunya. Dana tersebut tidak sekadar angka, tetapi menjadi mesin penggerak perekonomian dengan efek berantai (*multiplier effect*) yang sangat besar.

Penambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke bank BUMN berfungsi sebagai stimulus awal untuk menggerakkan perekonomian. Dengan tambahan likuiditas, bank memiliki modal lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, seperti UMKM, infrastruktur, manufaktur, dan pertanian. Akses kredit yang lebih mudah akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, dan merekrut tenaga kerja baru. Penyaluran dana pemerintah melalui perbankan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi sektor-sektor padat karya atau sektor produktif yang selama ini mengalami kekeringan pembiayaan.

Salah satu dampak positif langsung dari meningkatnya pembiayaan adalah penciptaan lapangan kerja. Sektor-sektor produktif yang mendapatkan tambahan modal kerja akan meningkatkan aktivitas usahanya, baik dalam bentuk ekspansi pabrik, pengadaan bahan baku, maupun distribusi produk. Hal ini menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja.

Kebutuhan tenaga kerja ini bukan hanya terjadi di sektor formal, tetapi juga sektor informal yang selama ini menyerap mayoritas tenaga kerja Indonesia. UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sangat diuntungkan dari peningkatan kredit mikro dan kecil yang disalurkan oleh bank BUMN. Dengan tambahan modal, pelaku UMKM dapat mempekerjakan lebih banyak pegawai dan memperbesar skala usahanya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan investasi Rp1 triliun berpotensi menciptakan hingga 2.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, bergantung pada sektor. Bisa dibayangkan berapa banyak lapangan kerja yang bisa tercipta dari tambahan pembiayaan senilai Rp200 triliun tersebut.

Ketika tenaga kerja terserap dan masyarakat memperoleh penghasilan, maka daya beli pun meningkat. Peningkatan pendapatan rumah tangga mendorong konsumsi terhadap barang dan jasa, yang dalam struktur PDB Indonesia merupakan komponen terbesar, mencapai lebih dari 55%.

Dengan meningkatnya konsumsi, pelaku usaha kembali mendapatkan permintaan yang lebih tinggi, yang mendorong produksi lebih lanjut. Inilah siklus positif ekonomi yang mencerminkan *multiplier effect*. Tidak hanya perusahaan besar yang merasakan dampaknya, tetapi juga sektor-sektor kecil seperti warung, toko kelontong, transportasi lokal, dan jasa rumah tangga.

Selain itu, daya beli yang meningkat akan memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Program-program pemerintah yang didorong melalui kebijakan fiskal juga akan menjadi lebih efektif

karena masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat.

Aktivitas ekonomi, baik produksi dan konsumsi, yang terjadi, pada akhirnya juga berpotensi mendongkrak penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak dari sektor UMKM akan tumbuh seiring membaiknya kinerja ekonomi.

Perusahaan yang tumbuh karena tambahan pembiayaan akan memiliki omzet dan laba yang lebih tinggi, yang berujung pada pembayaran PPh badan lebih besar. Tenaga kerja yang sebelumnya tidak bekerja kini menjadi wajib pajak baru melalui PPh 21. Begitu pula dengan pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem formal dan terdaftar sebagai pembayar pajak final UMKM.

Dari sisi cukai, peningkatan konsumsi barang-barang kena cukai, seperti minuman berpemanis, rokok, atau alkohol, juga dapat menambah penerimaan negara. Pemerintah memiliki peluang untuk menyesuaikan tarif secara progresif sesuai arah kebijakan fiskal.

Di luar semua itu, dampak positif dari guyuran Rp200 triliun ke bank BUMN juga dirasakan di daerah. Sebab, bank-bank BUMN pada umumnya memiliki jaringan yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Bank-bank BUMN yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional, memiliki jaringan distribusi luas dan basis nasabah besar, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan secara cepat dan merata. Penyaluran kredit tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan mikro dan ultramikro, serta pembiayaan sektor pertanian dan perikanan,

akan dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia.

Perekonomian daerah akan bergerak lebih cepat. Pemerintah Daerah juga kecipratan manfaat berupa peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi. Alhasil kapasitas fiskal daerah untuk membangun infrastruktur dasar serta penyelenggaraan program jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan bisa ditingkatkan dan diperluas.

Dampak ke Sistem Perbankan

Penempatan dana dari rekening pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank-bank BUMN, tidak hanya berdampak terhadap sektor riil, tetapi secara langsung memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perbankan nasional, baik dari sisi likuiditas, profitabilitas, intermediasi, hingga kualitas aset.

Seperti telah disinggung sebelumnya, dampak pertama yang paling langsung terasa adalah penguatan likuiditas perbankan, khususnya bank BUMN yang menerima dana pemerintah. Likuiditas yang kuat memungkinkan bank untuk menjalankan fungsi intermediasinya dengan lebih leluasa.

Dalam kondisi normal, bank memperoleh likuiditas dari DPK, seperti tabungan dan deposito. Namun, dalam situasi ketidakpastian ekonomi, seperti pascapandemi atau menjelang perlambatan global, penempatan dana oleh pemerintah menjadi strategi yang efektif untuk menjaga ketersediaan dana segar di sistem perbankan.

Dengan tambahan Rp200 triliun, loan to deposit ratio (LDR) bank dapat tetap terjaga pada level sehat, memberikan ruang untuk ekspansi

kredit tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.

Misi utama penempatan dana pemerintah ke bank adalah untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil, terutama UMKM, sektor pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Bank BUMN, dengan modal tambahan ini, dapat memperbesar portofolio kreditnya tanpa menambah beban biaya dana (*cost of fund*). Mereka juga dapat menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif, sehingga menarik bagi dunia usaha yang sedang berusaha bangkit dari tekanan ekonomi.

Peningkatan kredit ini akan berkontribusi pada pendapatan bunga bank (*interest income*), yang merupakan **komponen utama dalam laba operasional perbankan**. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas kredit juga akan meningkatkan pangsa pasar bank BUMN dan memperkuat posisi kompetitifnya di industri perbankan nasional.

Ekonom memperkirakan, injeksi likuiditas Rp200 triliun bisa meningkatkan sekitar 2% dari posisi dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Dengan posisi itu, laju penyaluran kredit bisa didorong tumbuh di atas 7% year on year.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juni 2025, total kredit yang disalurkan bank sekitar Rp8.060 triliun. Posisi itu tumbuh 7,77% secara tahunan. Dengan asumsi bank-bank BUMN menyalurkan seluruh Rp200 triliun tersebut ke sektor riil, diperkirakan ada tambahan sekitar 2,53% dari jumlah yang telah disalurkan perbankan saat ini.

Dampak lainnya, inisiatif Menkeu Purbaya diperkirakan juga akan menambah likuiditas di pasar uang antarbank (PUAB). Pada gilirannya, kondisi itu juga bisa menekan suku bunga antarbank, sehingga bank

juga bisa menekan biaya dana mereka. Dengan sendirinya, manfaatnya juga dirasakan oleh bank-bank non-BUMN.

Dana pemerintah yang ditempatkan di bank, memiliki biaya dana yang lebih rendah dibandingkan dengan dana dari nasabah pada umumnya. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi bank dalam hal menekan *cost of fund*.

Dengan biaya dana yang rendah, margin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) dapat terdongkrak, meski bank menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah kepada nasabah. Ini adalah situasi win-win, baik bagi bank maupun bagi dunia usaha.

Efisiensi biaya dana ini juga dapat membantu perbankan menjaga profitabilitasnya. Indikator seperti *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) berpotensi meningkat, mencerminkan efisiensi dan efektivitas operasional bank.

Tak hanya dari pendapatan bunga, profitabilitas juga terdorong oleh peningkatan *fee based income*. Bergeraknya aktivitas ekonomi yang memacu konsumsi masyarakat berpotensi mempertebal *fee based income* bank dari layanan transaksi digital yang saat ini sudah membudaya.

Dengan demikian, meskipun dana Rp200 triliun hanya disalurkan melalui lima bank BUMN, dampaknya juga dirasakan oleh industri perbankan secara keseluruhan. Ketika bank BUMN meningkatkan kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap layanan perbankan lain pun ikut meningkat.

Tidak hanya perbankan, meningkatnya aktivitas ekonomi akibat penyaluran kredit turut meningkatkan permintaan terhadap

jasa-jasa pendukung perbankan, seperti layanan digital, asuransi, dan pembiayaan rantai pasok (*supply chain financing*), yang menjadi peluang pertumbuhan baru bagi sektor keuangan.

Penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar ke bank BUMN pada akhirnya juga berperan sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Sebab, likuiditas yang cukup di sektor perbankan akan menghindarkan potensi gangguan aliran kredit, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Dalam situasi ketidakpastian global seperti saat ini, yang ditandai dengan konflik geopolitik dan ketegangan akibat perang dagang, kestabilan sistem keuangan menjadi fondasi penting bagi ekonomi nasional. Dengan dana tambahan ini, bank dapat mempersiapkan cadangan likuiditas yang lebih kuat, meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR), dan membangun sistem pengelolaan risiko yang lebih solid.

Tantangan dan Risiko

Langkah menyuntikkan likuiditas Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN harus diakui merupakan kebijakan agresif dan eksperimental dari sisi fiskal yang diinisiasi Menkeu Purbaya di awal masa jabatannya sebagai bendahara negara. Inisiatif itu diambil sebagai terobosan menanggulangi perlambatan ekonomi. Jika dijalankan dengan disiplin, di mana dana disalurkan ke kredit produktif dengan seleksi risiko ketat sesuai prinsip kehati-hatian, kebijakan ini dapat memiliki dampak positif nyata dalam membantu pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan menuju target 8%.

Namun di balik semua potensi dampak positif, tentu ada tantangan

dan risiko di balik kebijakan ini. Salah satunya adalah kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit. Saat pertama kali inisiatif injeksi likuiditas ini diumumkan, kalangan ekonom, pengusaha, dan bankir kompak mengingatkan bahwa persoalan utama yang dihadapi terkait kredit bukanlah kekeringan likuiditas. Tantangan terbesar adalah lesunya *demand* akibat perlambatan ekonomi. Adapun injeksi likuiditas adalah pendekatan dari sisi *supply*.

Solusi awal yang diharapkan dari pemerintah adalah memperbaiki kondisi ekonomi, seperti kebijakan yang bisa memulihkan daya beli dan konsumsi masyarakat, agar mesin-mesin produksi bisa kembali bergerak. Pada gilirannya hal itu bisa menciptakan *demand* kredit perbankan.

Peningkatan kredit ini akan berkontribusi pada pendapatan bunga bank (interest income), yang merupakan komponen utama dalam laba operasional perbankan.

Apalagi, saat ini masih ada sekitar Rp2.300 triliun undisbursed loan. Apabila tidak ada perbaikan dari sisi



demand, bank dikhawatirkan tidak akan mampu menyalurkan tambahan likuiditas dari pemerintah itu menjadi kredit, atau dengan kata lain hanya akan menambah kredit yang tidak bisa disalurkan.

Tantangan lainnya adalah potensi memburuknya kualitas aset kredit. Hal itu bisa terjadi jika dana dari pemerintah disalurkan tanpa analisis risiko yang matang, lantaran bank menganggap injeksi likuiditas itu sebagai "bantuan likuiditas" sehingga menyalurkannya ke sektor berisiko tinggi.

Kalangan pengusaha, seperti Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani secara umum menyambut positif langkah pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun ke bank-bank BUMN. Mereka menganggapnya sebagai

stimulus tambahan ke perekonomian, khususnya ke dunia usaha.

Namun, para pengusaha juga mengingatkan tantangan terbesar adalah pada kemampuan dunia usaha menyerap kredit tersebut. Dikhawatirkan, permintaan kredit dari sektor UMKM masih belum cukup kuat untuk menyerap tambahan likuiditas tersebut. Jika bank hanya menyalurkan ke korporasi besar dan proyek pemerintah, *multiplier effect* terhadap perekonomian secara luas sulit terwujud sebagaimana diharapkan.

Pada akhirnya, efektivitas inisiatif mengguyur perbankan dengan tambahan likuiditas Rp200 triliun juga bergantung pada perbaikan dari sisi *demand*. (***)



Photo : Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg via Getty Images

Stephen Miran dan Arah The Fed

Ambisi Donald Trump untuk mengendalikan kebijakan moneter di Federal Reserve mulai terbuka jalannya. Adalah Stephen Miran, salah satu loyalis Trump, yang membuka jalan itu.

Pada 16 September lalu, Miran secara resmi dilantik menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed. Dia menggantikan Adriana Kugler, dan akan menyelesaikan sisa masa jabatan pendahulunya hingga 31 Januari 2026.

Meskipun relatif pendek, kehadiran Miran dianggap menjadi representasi kepentingan Trump di bidang ekonomi. Hal itu lantaran sebelum bergabung di The Fed, Miran adalah Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Donald Trump. Meskipun sudah resmi duduk di otoritas moneter tertinggi, Miran ternyata belum menanggalkan posisinya di Gedung Putih. Dia memilih untuk mengambil "cuti tanpa bayaran", alias memiliki dua peran.

Dengan satu kursi tambahan yang dianggap loyalis, memudahkan Trump memperoleh pengaruh lebih besar atas

kebijakan The Fed, terutama ambisinya mendorong kebijakan suku bunga yang lebih rendah jika suara lain di Dewan kurang bulat. Miran sebelumnya sudah bersuara bahwa suku bunga The Fed sekarang terlalu tinggi, dan dia mendukung pemotongan yang lebih agresif.

Menghadapi kritik dan keraguan banyak pihak bahwa dia akan menjadi kepanjangan Trump, Miran menegaskan bahwa dia akan "beroperasi secara *independent* berdasarkan analisis mandiri". Namun status "*dual role*" yang disandangnya, berpotensi bias kepentingan antara kebijakan eksekutif dan moneter.

Faktanya, sikap Miran setali tiga uang dengan keinginan Trump, yakni The Fed lebih agresif menurunkan suku bunga.

Dalam berbagai kesempatan, Miran terang-terangan menunjukkan sikap "*dovish*" dalam kebijakan moneter.

Saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Gubernur Fed pada 22 September 2025, Miran menegaskan pandangannya bahwa kebijakan moneter saat ini sangat restriktif. Menurutnya, suku bunga acuan (*Federal Funds Rate*) saat ini terlalu tinggi sekitar 2 poin persentase dibandingkan tingkat netral baru yang dia perkirakan. Miran mengusulkan agar Fed melakukan pemotongan suku bunga 0,5% dalam satu langkah, bukan 0,25% seperti yang dipilih mayoritas dan dilakukan selama ini.

Sikap agresifnya tersebut, juga sejalan dengan sikap Presiden Trump yang sejak lama menekan The Fed agar menurunkan suku bunga. Dengan adanya suara sah dari dalam Dewan Gubernur yang mendukung

suku bunga lebih rendah, tekanan politik bisa semakin terinternalisasi dalam diskusi kebijakan moneter. Pasar pun akan memperhatikan apakah kebijakan akan cenderung lebih "dovish" (relaksatif) ketimbang sebelumnya.

Sejak menduduki tampuk kepresidenan pada periode 2017-2022, Donald Trump secara eksplisit menunjukkan ambisinya untuk mempengaruhi bahkan mengendalikan The Fed. Padahal, lembaga itu selama bertahun-tahun mampu secara konsisten menegakkan muruah independensi dari pengaruh politik dalam setiap pengambilan kebijakan moneter.

Seolah tak terhitung kritik yang dilontarkan Trump kepada Federal Reserve, juga kepada sang ketua, Jerome Powell. Padahal Powell adalah sosok yang dipilih langsung oleh Trump pada 2018 menggantikan Janet Yellen. Mula-mula, Trump mengkritik kebijakan The Fed di bawah Powell yang menaikkan suku bunga pada rentang 2018-2019. Trump menilai, langkah itu menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan bursa saham.

Trump berkali-kali meminta The Fed untuk menurunkan suku bunga hingga nol atau bahkan negatif, mengikuti kebijakan beberapa bank sentral di Eropa dan Jepang. Tak hanya itu, dia

bahkan ingin agar dolar AS lebih lemah dan biaya pinjaman lebih murah untuk mendongkrak ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah pandangan yang sangat kontras dengan karakter AS sebagai kekuatan super-ekonomi di dunia. *"I think, the Fed has gone crazy,"* demikian kritik pedasnya pada Oktober 2018.

Trump bahkan menyebut The Fed sebagai ancaman terbesar terhadap perekonomian AS dibandingkan dengan ancaman yang ditimbulkan dari perang dagang dengan Tiongkok.

Sang presiden pun pernah berupaya menyingkirkan Powell. Sejumlah nama loyalis yang berlatar ekonom konservatif diusulkan untuk duduk di The Fed. Namun,



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH – TAHUN 2025

Sesuai pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015, dengan ini Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta ("Bank") (NPWP 0020 5845 6105 3000) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2025 sebagai berikut:

NO.	NAMA DEBITUR	CCY	HAPUS BUKU
1	PT SRI REJEKI ISMAN TBK.	IDR	357.485.560.161,56
2	PT SRI REJEKI ISMAN TBK.	USD	23.216.351,89

Keterangan:

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengumuman Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih ini tidak mengurangi kewajiban Debitur kepada Bank dan Bank akan tetap berupaya melakukan penagihan sampai Debitur menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank.
3. Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing, Jakarta Selatan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

"The Fed doesn't know what it's doing. We should have the right people in there"

~ Trump

kala itu semua kandas lantaran tekanan publik dan kekhawatiran terhadap independensi lembaga itu.

"The Fed doesn't know what it's doing. We should have the right people in there," ujar Trump menyiratkan keinginannya menyingkirkan Powell sekaligus mengambil kendali atas The Fed.

Memasuki periode kepresidenannya yang kedua pada Januari 2025 lalu, langkah Trump untuk menancapkan pengaruhnya dalam kebijakan The Fed tak surut. Dia berpendapat, sebagai kepala negara dan pemerintahan, sudah seharusnya Presiden memiliki suara dalam keputusan moneter.

Langkah radikal pun dilakukannya antara lain dengan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung AS agar The Fed bisa memecat seorang Gubernur. Tak hanya itu, dia juga mengajukan sebuah perintah eksekutif agar semua lembaga independent, terutama di sektor keuangan, lebih sering berkonsultasi dengan White House dan mematuhi pandangan eksekutif.

Namun, semua langkah itu kandas. Antara lain munculnya kritik jika terjadi politisasi terhadap The Fed justru menghancurkan kredibilitas Trump sendiri.

Di tengah semua itu, bergabungnya Stephen Miran di jajaran Dewan Gubernur The Fed dipahami sebagai langkah nyata Trump untuk mempengaruhi otoritas tertinggi moneter tersebut. Apalagi, Miran dikenal sangat vokal menuntut

langkah penurunan suku bunga yang lebih agresif.

Kecenderungan Kebijakan The Fed

Pada 17 September lalu, pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (0,25%) ke level 4% hingga 4,25%. Entah ada kaitannya atau tidak, keputusan itu keluar sehari setelah Stephen Miran secara resmi duduk sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed.

Merujuk data, pada pertengahan 2025, suku bunga efektif berada di kisaran 4,33%. Sebelumnya, pada akhir 2024, masih di level 4,48%.

Kehadiran Miran di The Fed, dibaca oleh pasar bahwa suara yang mendukung pemotongan suku bunga lebih lanjut akan semakin menggema dalam pertemuan FOMC. Apalagi, Miran sebenarnya menyatakan menolak *consensus (dissenting opinion)* dalam pertemuan terakhir. Dia mengusulkan penurunan 50 basis poin, bukan 25 basis poin sebagaimana yang lazim dipraktikkan The Fed selama bertahun-tahun.

Kalangan analis melihat sejumlah skenario arah kebijakan suku bunga Federal Reserve ke depan. Jika tradisi penurunan

25 basis poin tetap dipertahankan, dalam 12 hingga 18 bulan ke depan, total pemangkasan yang terjadi sebesar 1% hingga 1,5%.

Jika suara Miran cukup memberi pengaruh dan memancing suara mayoritas, bisa jadi The Fed akan langsung memangkas 50 basis poin. Hal ini akan mempercepat penurunan suku bunga Federal Funds Rate ke posisi 2,75% hingga 3% dalam jangka menengah.

Miran sendiri telah menegaskan pandangannya bahwa suku bunga saat ini (4% hingga 4,25%) masih terlalu tinggi. Dia menargetkan suku bunga *"low-to mid 2%"*.

Akan tetapi, terlepas adanya tekanan *"dovish"* dari kehadiran Miran, The Fed tentu juga akan melihat risiko inflasi global maupun domestik, serta risiko pasar keuangan. Apalagi situasi global masih dipenuhi ketidakpastian oleh adanya konflik di sejumlah wilayah yang menyeret keterlibatan AS.

Dengan demikian, jalur pemotongan bertahan oleh kalangan pengamat diyakini lebih masuk akal ditempuh The Fed, ketimbang jalur agresif. Apalagi, sejarah The Fed menunjukkan lembaga itu selama ini ekstra hati-hati merespons sinyal inflasi. (***)



Rezim Pelonggaran Moneter di Dalam Negeri



Photo : Dimas Ardian | Bloomberg | Getty Images

Di hari yang sama dengan pengumuman *Federal Open Market Committee* (FOMC), Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Day *Reverse Repo Rate* sebesar 25 basis poin ke posisi 4,75%. Sebelumnya, BI telah memangkas suku bunga acuan hingga total mencapai 100 basis poin sepanjang 2025. Pemangkasan tersebut dilakukan pada Januari 2025, Mei 2025, Juli 2025, dan Agustus 2025, masing-masing sebesar 25 basis poin.

Keputusan tersebut menegaskan langkah BI memasuki rezim pelonggaran moneter. Langkah itu tentu mempertimbangkan ruang bagi stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga target inflasi yang menjadi *"core business"* bank sentral.

Momentum penurunan suku bunga yang bersamaan oleh The Fed dan BI tersebut tentu tidak bisa dipersepsi bahwa kebijakan moneter domestik semata dipicu oleh perkembangan moneter di AS. Kondisi internal, seperti tekanan inflasi, nilai tukar, kondisi kredit perbankan, dan lain-lain tentu menjadi pertimbangan penting, ketimbang sikap responsif terhadap The Fed.

Kebijakan The Fed, tak bisa dimungkiri, selalu mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai jangkar ekonomi dunia, setiap variabel ekonomi di AS berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi global. Arah kebijakan The Fed menjadi navigasi bagi otoritas moneter di seluruh dunia.

AS telah memasuki era *"dovish"*. Terlepas ada atau tidaknya pengaruh dari ambisi Presiden Donald Trump agar AS lebih melonggarkan kebijakan moneternya, secara bertahap The Fed telah menurunkan suku bunganya.

Kehadiran Stephen Miran, loyalis Trump, di kursi Dewan Gubernur The Fed, diyakini menjadi daya dorong agresivitas lembaga itu memasuki rezim *"dovish"*. Setidaknya hal itu yang terbaca oleh pelaku pasar.

Lantas, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan moneter di dalam negeri, dan tentu juga bagi perbankan?

Jika Fed mulai memotong suku bunga lebih agresif sebagai akibat pengaruh politik atau pengaruh *"dovish"*, seperti



yang disuarakan Miran, maka tekanan terhadap rupiah dan arus modal keluar akan mereda. Kondisi itu memperlebar ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga acuan lebih dalam lagi, dengan risiko minimal akan adanya tekanan terhadap inflasi maupun depresiasi.

Selain itu, pemotongan suku bunga di AS dapat mendorong aliran modal masuk ke pasar Indonesia. Hal ini mendukung apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan membanjiri likuiditas di pasar lokal.

Apresiasi terhadap rupiah, pada gilirannya menurunkan beban impor dan juga biaya utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta. Kondisi ini membuka ruang bagi kegiatan ekonomi yang bergantung pada komponen impor dan pembiayaan eksternal.

Stephen Miran telah membawa elemen baru, yaitu suara yang secara terbuka mendorong pemotongan suku bunga lebih agresif berdasarkan argumen bahwa suku bunga netral telah turun. Jika suara ini mampu mempengaruhi konsensus FOMC, laju pemotongan suku bunga AS bisa lebih cepat dari ekspektasi pasar.

Bagi Indonesia, hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi BI untuk melonggarkan suku bunga acuan juga lebih agresif yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu suku bunga rendah. Dengan asumsi The Fed secara konsisten menurunkan *Federal Funds Rate* secara bertahap masing-masing sebesar 25 basis poin yang bisa memicu arus modal masuk, BI bisa memangkas suku bunga acuan hingga 18 bulan ke depan hingga ke level

4% hingga 4,5%. Suatu level yang cukup ideal bagi perekonomian.

Dampak ke Perbankan

Kombinasi dari suku bunga rendah dan apresiasi nilai tukar rupiah sebagai dampak dari rezim "dovish" di AS, pada gilirannya juga membawa dampak positif bagi perbankan. Suku bunga rendah memungkinkan bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit. Apresiasi nilai tukar rupiah juga mendorong semakin bergeraknya dunia usaha yang akan membutuhkan pembiayaan untuk melakukan ekspansi usahanya.

Kualitas aset kredit pun membaik, sehingga menurunkan rasio kredit bermasalah. Dengan demikian risiko kredit berkurang dan lebih terkendali.

Turunnya suku bunga di AS juga membuat aset keuangan di negara lain, seperti Indonesia menjadi lebih menarik karena adanya selisih suku bunga. Investor pemilik dana tentu mengejar imbal hasil (*yield*) yang lebih tinggi, sehingga arus modal asing akan masuk membanjiri Indonesia. Perbankan nasional pun diuntungkan karena memiliki akses dana di pasar internasional yang lebih mudah dengan biaya dana (*cost of fund*) yang lebih murah.

Apresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi sebagai imbas turunnya suku bunga The Fed, diharapkan mendorong daya beli yang lebih baik terhadap produk impor. Kondisi ini membuka ruang bagi peningkatan kredit konsumsi di perbankan. (***)



Peran Strategis Bank dalam Literasi Keuangan

Di tengah pesatnya perkembangan inovasi teknologi di sektor finansial, literasi keuangan menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi sebuah negara. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola uang, menabung, atau berinvestasi, tetapi juga berdampak besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa pemahaman yang memadai tentang keuangan, masyarakat rentan membuat keputusan finansial yang buruk, yang pada akhirnya bisa menghambat pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

Maksud utama dari literasi keuangan adalah agar setiap warga negara memperoleh dan memahami informasi keuangan. Dengan demikian mereka dapat membuat keputusan pengelolaan keuangan serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara bijak, terhindar dari risiko yang merugikan.

Literasi keuangan yang memadai, akan mendorong inklusi keuangan atau keterlibatan warga dalam sistem keuangan formal. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk perluasan basis

nasabah perbankan, serta distribusi modal ke berbagai sektor produktif. Sebaliknya, literasi keuangan yang rendah, membuat publik bergantung dan terjebak pada praktik keuangan informal yang berisiko tinggi, seperti rentenir atau praktik pinjaman ilegal. Jika ini dibiarkan, akan memperdalam kemiskinan yang merugikan ekonomi negara.

Penopang Pertumbuhan

Dalam tataran makro, masyarakat yang cakap secara finansial berpotensi terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Ini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi riil dan keuangan, memperkuat daya saing nasional, serta memperluas basis pajak negara.

Kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi secara bijak berdampak langsung terhadap kestabilan ekonomi rumah tangga, yang secara kolektif menopang fondasi ekonomi nasional. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan tinggi cenderung lebih disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan menggunakan produk keuangan formal. Hal ini

mendorong peningkatan dana pihak ketiga di perbankan, memperbesar kapasitas pembiayaan bagi sektor usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan akses modal yang lebih luas, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja meningkat.

Dari sisi makroekonomi, masyarakat yang cakap secara finansial akan lebih siap menghadapi tekanan ekonomi, seperti inflasi atau krisis global. Mereka mampu mengatur pengeluaran, menjaga daya beli, dan tetap aktif secara ekonomi di tengah situasi sulit.

Di era ekonomi digital saat ini, literasi keuangan menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan beragam layanan keuangan digital yang ditawarkan industri keuangan. Sebab, saat ini produk keuangan marak tersedia dalam berbagai aplikasi, layanan daring, dan sistem pembayaran elektronik. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat bisa salah menggunakan teknologi finansial, mengalami penipuan, atau tidak mampu mengelola data pribadinya secara aman. Negara yang ingin sukses dalam transformasi ekonomi

digital harus memastikan warganya memiliki bekal literasi keuangan yang kuat untuk mengikuti perkembangan zaman.

Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, pada umumnya lebih tahan terhadap gejolak ekonomi, terutama di sektor keuangan. Sebab, masyarakatnya mampu membuat keputusan yang rasional dan *prudent* dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan finansial. Selain itu, mereka juga mampu merespons secara cepat saat ada gejolak di sektor keuangan baik akibat perubahan kebijakan maupun karena dampak kondisi pasar. Dengan kata lain, literasi keuangan yang baik juga membantu menjaga kesehatan sistem keuangan nasional.

Literasi keuangan secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Individu yang mampu mengelola uang dengan baik, mereka akan memiliki tabungan, investasi, serta perlindungan asuransi yang memadai. Hal ini mengurangi kebergantungan pada bantuan sosial dan meminimalkan risiko kemiskinan akibat musibah atau kehilangan pendapatan mendadak. Dengan tingkat kesejahteraan yang merata, stabilitas sosial pun lebih mudah dijaga. Pemerintah juga dapat lebih fokus pada program pembangunan jangka panjang.

Pentingnya literasi keuangan sudah disadari sejak lama. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan edukasi keuangan digencarkan dengan melibatkan semua pelaku industri jasa finansial dan pemangku kepentingan sektor keuangan. Kampanye intensif mengenai pentingnya literasi keuangan, menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dengan terus membaiknya indeks literasi dan inklusi keuangan. Pada 13 Januari

hingga 11 Februari lalu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) digelar OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya terjadi tren peningkatan. Untuk indeks literasi keuangan berdasarkan SNLIK 2025 di level 66,46%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang di level 65,43%, sedangkan, indeks inklusi keuangan naik menjadi 80,51% dari 75,02% pada tahun lalu.

Secara sektoral, indeks literasi dan inklusi bisa dilihat pada tabel berikut.

Sektor	Literasi (%)	Inklusi (%)
Perbankan	65,50	70,65
Lembaga keuangan mikro	9,80	1,20
Pasar modal	17,78	1,34
Asuransi	45,45	28,50
Lembaga pembiayaan	46,66	12,38
Dana pensiun	27,79	5,37
Pergadaian	54,74	8,23
Fintech lending	24,90	4,40
Jasa keuangan lainnya	42,77	14,71

Bulan Literasi Keuangan

Setiap tahun, OJK bersama industri jasa keuangan menggelar bulan literasi keuangan. Tahun ini, kegiatan tersebut digelar pada 22 Mei hingga Agustus. Tema yang dipilih adalah “Generasi Muda Melek Finansial, Wujudkan Masa Depan Sejahtera di Era Digital.”

Sedikitnya 7.200 kegiatan digelar di 415 kabupaten/kota, dengan menyasar kalangan pelajar, UMKM, dan masyarakat umum. Selain itu, 4225 konten edukasi dipublikasikan melalui *platform* digital yang menjangkau lebih dari 100 juta *viewers*. Tema yang diangkat mencakup perencanaan keuangan, literasi digital, kampanye waspada *fintech* ilegal, serta keamanan transaksi keuangan digital.

Bulan Literasi Keuangan tahun ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat Program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar). Selama periode Hari Indonesia Menabung pada 1 Juli hingga 10 Agustus 2025 telah dibuka lebih dari 263.000

rekening baru oleh pelajar, dengan total setoran simpanan mencapai Rp338,6 miliar. Mengutip data OJK, Program Kejar hingga saat ini telah mencapai sedikitnya 57 juta pelajar di seluruh Indonesia, dengan total simpanan mencapai Rp34,6 triliun. Fakta itu menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini serta mendorong kemandirian finansial generasi muda.

Meskipun indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tantangan masih menghambat percepatannya. Salah satu tantangan *structural* adalah masih lebarnya kesenjangan pendidikan dan akses informasi. Disadari bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor terpenting dalam literasi keuangan. Survei SNLIK 2025 oleh OJK dan BPS, ditemukan fakta bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi memiliki indeks literasi hingga di atas 90%. Sebaliknya, yang tidak bersekolah indeksnya di kisaran 43%.

Tantangan mendasar lain yang selama bertahun-tahun belum teratasi adalah kesenjangan atau gap antara literasi dan inklusi. Selama ini banyak masyarakat yang sudah memiliki akses ke produk dan layanan keuangan, tetapi dengan tingkat pemahaman yang rendah atau kurang memadai. Ini tercermin dari SNLIK 2025 yang menunjukkan indeks literasi baru 66%, sedangkan inklusi sudah mencapai 80%.

Hal ini berakibat maraknya kasus produk dan jasa keuangan yang merugikan masyarakat. Salah satu yang marak adalah banyaknya warga yang menjadi korban pinjaman online berbasis layanan digital (pinjol) ilegal. Bahkan tidak sedikit korban yang terpaksa mengakhiri hidup akibat tidak tahan dengan tekanan

yang dialami. Kasus lain adalah yang juga cukup marak antara lain investasi bodong dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia *platform* layanan keuangan digital ilegal.

Tantangan lain adalah kompleksitas produk keuangan modern. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul beragam produk dan layanan keuangan yang memanfaatkan *platform* digital. Inovasi keuangan digital (*fintech*) di satu sisi membawa peluang akses yang lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain juga menyimpan tantangan risiko yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Risiko dimaksud antara lain bunga, biaya yang tak

pendidikan yang kurang memadai. Mereka rata-rata tergiur oleh iming-iming keuntungan instan dan sikap FOMO ("*fear of missing out*") sekadar terseret arus keuangan modern.

Kendala fundamental lain adalah budaya konsumerisme di masyarakat. Tidak sedikit keluarga yang belum memiliki kebiasaan menabung, pengelolaan keuangan, dan memandang penting dana darurat. Sikap konsumtif sering mengalahkan logika finansial jangka panjang. Apalagi serbuan produk layanan keuangan yang menawarkan kemudahan pembiayaan, menjerat masyarakat sehingga tak mampu keluar dari kubangan konsumerisme yang kebablasan tersebut.



diungkap oleh penyedia produk, risiko keterlambatan, dan juga risiko menyangkut keamanan data pribadi.

Produk keuangan kekinian, seperti investasi aset kripto, juga termasuk yang cukup kompleks untuk dipahami oleh warga dengan tingkat

Posisi Strategis Perbankan

Dari sekian banyak industri jasa keuangan, sektor perbankan mencatat indeks tertinggi baik dari sisi literasi maupun inklusi. Menurut SNLIK 2025, literasi di

sektor perbankan mencapai 65%, dan indeks inklusinya 70%. Meskipun paling tinggi, perlu dicermati bahwa masih 35% atau sepertiga dari penduduk Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap perbankan. Dengan indeks inklusi di level 70%, berarti ada 15% warga yang memanfaatkan layanan perbankan dengan pemahaman yang kurang. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat perbankan merupakan layanan keuangan tradisional yang sangat mendasar, dan sudah lama dikenal masyarakat.

Sektor perbankan sebagai tulang punggung sistem keuangan formal memiliki aspek literasi yang relatif mudah dipahami orang kebanyakan. Elemen-elemen literasi sektor perbankan sudah cukup dikenal masyarakat, seperti pemahaman mengenai tabungan, giro, deposito, bunga, dan biaya administrasi. Demikian pula produk kredit yang beragam untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Salah satu tantangan terbesar adalah literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih cukup tertinggal di banding perbankan konvensional bahkan dibandingkan jasa keuangan lainnya. Menurut SNLIK 2025, indeks literasi keuangan syariah (termasuk perbankan syariah) masih di level 43%, dan indeks inklusinya 13%. Pencapaian itu masih jauh di bawah indeks literasi keuangan secara umum yang mencapai 66%.

Perbankan, sebagai produk keuangan tradisional perlu terus didorong sebagai pintu masuk literasi keuangan yang lebih luas. Sebab, mayoritas masyarakat terlebih dulu mengenal bank ketimbang produk dan layanan keuangan lainnya. Perbankan memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu

sektor jasa keuangan yang paling dikenal dan digunakan masyarakat, bank berperan bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai agen edukasi keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, perbankan diyakni memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Sektor perbankan merupakan pintu utama masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal. Mulai dari menabung, menerima gaji, transaksi digital, polis asuransi, investasi pasar modal, hingga investasi kripto banyak dilakukan melalui bank. Karena itu, perbankan memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh yang besar terhadap pola perilaku keuangan masyarakat.

Bank, baik konvensional maupun digital, memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem yang memungkinkan penyampaian edukasi keuangan secara langsung dan masif. Melalui interaksi sehari-hari dengan nasabah, bank dapat memberikan pemahaman tentang cara mengelola uang, pentingnya menabung, penggunaan kredit yang sehat, hingga pengenalan produk-produk keuangan lain, serta pemahaman terhadap risiko keuangan.

Selain itu, bank juga memiliki potensi besar untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), melalui program inklusi keuangan dan digitalisasi layanan.

Dalam era digital saat ini, perbankan tidak hanya melayani nasabah melalui kantor cabang fisik, tetapi juga melalui aplikasi *mobile banking* dan layanan digital lainnya. Hal ini membuka peluang besar untuk mengintegrasikan edukasi keuangan ke dalam *platform* digital secara lebih



praktis dan interaktif. Banyak bank telah mengembangkan fitur edukatif dalam aplikasinya, seperti simulasi keuangan, kalkulator pinjaman, dan konten edukatif yang mudah diakses.

Dengan pendekatan digital ini, bank dapat menyasar generasi muda yang akrab dengan teknologi tetapi belum tentu memiliki pemahaman finansial yang baik. Ini menjadi kunci dalam menanamkan perilaku keuangan yang sehat sejak dini.

Oleh karena itu, keberhasilan agenda literasi keuangan nasional tidak bisa dilepaskan dari peran aktif sektor perbankan sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Negara yang penduduknya paham keuangan adalah negara yang siap menghadapi tantangan ekonomi, membangun masa depan yang lebih sejahtera, dan memastikan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (***)



Photo : Kantor Staf Presiden/www.ksp.go.id/

Fast Track Sektor Perumahan

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan. Program prioritas itu dituangkan melalui pembangunan 3 juta rumah.

Pilihan terhadap sektor perumahan karena sektor ini berkaitan langsung pemenuhan hak dasar warga negara. Masih tingginya angka "backlog" (kekurangan rumah) di Indonesia, yang mencapai 12 juta unit, menyiratkan adanya kebutuhan mendesak terhadap penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Penyediaan rumah bukan semata soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan struktural, serta kesejahteraan sosial warga.

Selain itu, langkah pemerintah tersebut tetapi juga bisa dilihat sebagai inisiatif strategi jalur cepat ("fast track") untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi yang melambat. Hal ini lantaran sektor perumahan atau properti memiliki

efek berganda yang sangat luas, sehingga menjadi sektor yang menjadi lokomotif bagi pergerakan sektor ekonomi lainnya.

Sektor tersebut memiliki peran strategis dalam perekonomian. Sektor properti merupakan penggerak bagi lebih dari 170 sub-sektor lainnya, mulai dari industri bahan bangunan, seperti semen, baja, keramik, cat, dan *furniture*; jasa konstruksi; pembiayaan; hingga logistik. Tak kalah pentingnya, sektor ini termasuk sektor padat karya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kata lain, geliat di sektor perumahan bisa menciptakan efek domino yang luar biasa besar terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.

Pemenuhan Hak Dasar

Pemenuhan kebutuhan perumahan layak merupakan bagian fundamental dari hak dasar setiap warga negara. Pemerintahan Prabowo saat ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan hal tersebut melalui program ambisius pembangunan 3 juta unit rumah. Program ini

tidak hanya bertujuan menekan angka "backlog" perumahan yang masih tinggi, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rumah yang layak dan terjangkau bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas sosial, kesehatan, dan produktivitas ekonomi keluarga. Tanpa tempat tinggal yang memadai, masyarakat sulit mengakses pendidikan, pekerjaan, serta layanan publik secara optimal.

Melalui program pembangunan 3 juta rumah, pemerintah membuka akses terhadap kepemilikan rumah dengan berbagai skema pembiayaan yang inklusif dan subsidi yang tepat sasaran. Dengan memastikan setiap warga memiliki hunian layak, negara tidak hanya menjalankan amanat konstitusi, tetapi juga membangun fondasi sosial-ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masa depan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan berbagai lembaga riset, "*backlog*" kepemilikan rumah (selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan yang tersedia) tercatat sekitar 12,7 juta unit pada 2023. Namun, pemerintahan baru menyebut bahwa *backlog* bisa meningkat menjadi 15 juta unit pada 2025.

Di sisi lain, pemerintah juga menyebut bahwa ada rumah tidak layak huni sebanyak 26 juta unit. Dengan demikian total kebutuhan rumah baik rumah baru maupun renovasi bisa jauh lebih besar.

Sebagai bukti komitmen pemerintah merealisasikan program prioritas tersebut, pada Senin 29 September 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci kepada warga di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Akad massal ini menjadi simbol hadirnya negara membantu jutaan masyarakat berpenghasilan rendah mewujudkan impian memiliki rumah layak huni.

Para penerima manfaat, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pengemudi ojek *online*, menilai rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan jaminan kepastian hidup dan masa depan yang lebih baik.

KUR Perumahan

Untuk lebih mengakselerasi program 3 juta rumah, terutama bagi MBR, pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini diharapkan memacu investasi penyediaan rumah sekaligus memberi kemudahan akses kredit kepada masyarakat yang hendak membeli atau merenovasi rumah.

Plafon yang disiapkan dalam skema tersebut mencapai Rp130 triliun. Jumlah itu terbagi masing-masing Rp117 triliun di sisi *supply*, yang dikhususkan bagi pengembang skala UMKM. Sedangkan, Rp13 triliun disiapkan di sisi *demand*, dikhususkan bagi individu dan pengusaha UMKM yang ingin membeli, membangun, maupun merenovasi rumahnya. Jika berhasil, pemerintah berencana meningkatkan plafon KUR hingga Rp250 triliun pada 2026.

Penyaluran KUR Perumahan dilakukan bank-bank yang selama ini ditunjuk menyalurkan KUR. Selain bank-bank Himbara, sekitar 31 bank telah siap membantu penyerapan plafon Rp130 triliun tersebut.

Hal yang menarik, melalui skema ini pemerintah juga mendorong tumbuh kembangnya pengembang perumahan skala UMKM. Mereka yang masuk kategori ini diberi plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar per pengajuan. Sedangkan bagi konsumen (sisi *demand*), disiapkan plafon antara Rp10 juta hingga Rp500 juta. Sebagaimana program KUR pada umumnya, pemerintah juga memberikan fasilitas subsidi bunga sebesar 5% pada KUR Perumahan.

Selain pengembang dan konsumen, fasilitas KUR Perumahan ini juga bisa dinikmati pengusaha UMKM yang bergerak dalam ekosistem perumahan. Mereka yang dimaksud antara lain pengusaha toko bahan bangunan dan jasa konstruksi. KUR Perumahan bisa diberikan sebagai modal kerja.

Dengan program KUR Perumahan, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan hunian melalui dorongan modal yang lebih murah dan merata, serta memberikan ruang bagi UMKM sektor konstruksi

untuk berkembang seiring dengan upaya menutup defisit perumahan nasional.

Mesin Ekonomi Baru

Program pembangunan 3 juta rumah tersebut pada akhirnya menjadi mesin ekonomi baru. Sebab, sektor *property* atau perumahan memiliki **efek pengganda** (*multiplier*) yang luas, baik terhadap sektor formal maupun informal. Pemerintah dan organisasi sektor properti menyebut bahwa pembangunan rumah menyentuh **lebih dari 170 sektor usaha** (sektor riil), mulai industri semen, baja, bahan bangunan, kaca, kayu, keramik, pipa, cat, kelistrikan, plafon, furnitur, peralatan rumah tangga, logistik, jasa konstruksi dan profesi penunjang, hingga perdagangan lokal di tingkat mikro.

Program perumahan memiliki daya ungkit bagi perekonomian nasional. Dalam perhitungan REI, kontribusi sektor properti terhadap PDB nasional sekitar 14%. Kontribusi sektor ini lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni bisa mencapai 35%–55%.

Riset yang dilakukan bersama oleh REI dan UI menyebut, setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun, berpotensi menyumbang hingga 0,56% terhadap perekonomian nasional. Jika program 3 juta rumah benar-benar terealisasi dan menyerap investasi besar setiap tahun, potensi percepatan pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.

Selain itu, efek penyerapan tenaga kerja juga cukup signifikan. Hal ini mengingat sektor properti tergolong sektor padat karya. Pembangunan 3 juta rumah akan membuka lapangan kerja secara masif, baik di sektor formal maupun informal.



Diperkirakan, untuk setiap 1.000 rumah yang dibangun, dapat menyerap hingga 500-700 tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Ini akan membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus kemiskinan, dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya mereka yang secara langsung terlibat dalam tahap konstruksi perumahan. Tetapi juga pasca-konstruksi. Misalnya, pada fase pemasaran memerlukan tenaga pemasaran, administrasi, dan juga promosi. Demikian juga pada fase pemeliharaan, semakin banyak rumah yang terbangun akan membutuhkan banyak tenaga keamanan kawasan perumahan, jasa pemeliharaan dan perbaikan listrik dan fasilitas pengairan, termasuk jasa kebersihan lingkungan.

Belum lagi kebutuhan tenaga kerja di sektor penunjang perumahan, seperti buruh pabrik semen, baja, kaca, dan furniture, tenaga ahli jasa konstruksi, serta tenaga distribusi logistik. Tak hanya itu, proyek perumahan akan menciptakan

peluang menjamurnya UMKM di sekitar kawasan proyek.

Dengan demikian, jika program ini digulirkan selama beberapa tahun, akan tercipta lapangan kerja yang bersifat berkelanjutan, terutama di daerah yang saat ini belum banyak proyek properti. Selain itu, stabilitas di sisi lapangan kerja juga akan meningkatkan daya beli masyarakat lokal, yang bisa memperkuat sirkulasi ekonomi di kawasan proyek.

Efek ke Perbankan

Geliat sektor properti melalui program 3 juta rumah sudah tentu memberi efek positif bagi perbankan. Ekspansi KPR akan terakselerasi. Perbankan memperoleh momentum untuk mempertebal portofolio KPR, baik subsidi maupun non-subsidi. Semua itu terjadi dengan risiko yang relative lebih terukur berkat adanya dukungan total oleh pemerintah.

Perbankan selama ini menjadi mesin pembiayaan utama bagi sektor perumahan. Bank memainkan peran secara langsung sebagai pemberi kredit **konstruksi** untuk

pengembang, penyedia KPR bersubsidi dan nonsubsidi kepada masyarakat, serta sebagai penyalur **skema** FLPP dan subsidi bunga.

Beberapa dampak positif program tersebut bagi perbankan, yang pertama tentu meningkatnya volume KPR. Hal ini akan berdampak juga pada penguatan aset produktif dan pendapatan bunga.

Berdasarkan data, per Juni 2025 lalu, total kredit properti yang telah disalurkan perbankan mencapai Rp 1.442 triliun, tumbuh 5,6% secara tahunan. Khusus segmen KPR dan KPA, pada periode yang sama penyalurannya telah mencapai Rp 816 triliun, dengan pertumbuhan 7,7% yoy.

Untuk program 3 juta rumah, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 57 triliun melalui APBN. Jumlah itu dialokasikan untuk membangun sekitar 770.000 unit. Dengan demikian masih ada kebutuhan anggaran yang diharapkan bisa disediakan oleh perbankan, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 335 triliun.

Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi industri jasa keuangan untuk mengembangkan diversifikasi produk keuangan. Produk dimaksud antara lain asuransi jiwa kredit perumahan, tabungan perumahan, bahkan reksa dana properti. Hal ini otomatis membuka pasar baru, memperluas basis nasabah, sekaligus terjadi pendalaman pasar keuangan.

Semakin bertambahnya fasilitas pembiayaan yang disalurkan, juga bisa mendorong bank untuk lebih agresif mengembangkan layanan digital untuk mempermudah konsumen untuk memproses pengajuan maupun bertransaksi. Digitalisasi layanan ini juga



sejalan dengan agenda nasional meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Meningkatnya aktivitas keuangan dari sektor perumahan, membuka peluang bagi bank mengakuisisi nasabah baru, sekaligus memperkuat basis dana pihak ketiga (DPK). Kalangan pengembang, supplier, dan konsumen KPR menjadi calon nasabah potensial.

Bertambahnya portofolio kredit properti juga bisa dimanfaatkan bank untuk mencari dana segar. Bank dapat melakukan sekuritisasi KPR menjadi Efek Beragunan Aset (EBA) yang ditawarkan kepada investor. Dana yang diperoleh dari EBA menjadi modal untuk menambah kapasitas penyaluran kredit properti mereka. Dengan kata lain skema EBA perlu juga dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan program perumahan pemerintah.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah merupakan peluang besar untuk memperluas bisnis pembiayaan, memperkuat intermediasi, serta menjadi bagian dari transformasi struktural di sektor perumahan.

Namun, ada hal-hal yang perlu dicermati oleh perbankan yang terlibat dalam program tersebut. Hal yang terutama adalah menjaga kualitas aset atau risiko kredit. Sebab, rasio kredit bermasalah (NPL) kredit properti per Mei tahun ini berada di posisi 3,24%. Khusus segmen KPR, NPL mencapai hampir 3%. Fakta ini tentu memaksa bank untuk ekstra hati-hati dalam menyalurkan kredit sektor perumahan.

Hal lain yang perlu dicermati adalah potensi "mismatch" likuiditas. Sebab, karakter kredit properti, terutama KPR adalah jangka panjang, yang rata-rata di atas 10 tahun. Sedangkan sumber dana perbankan mayoritas

adalah jangka pendek dari tabungan dan deposito

Oleh karenanya, bank perlu menggali basis pendanaan eksternal, seperti sekuritisasi EBA maupun penerbitan obligasi. Langkah ini juga untuk menjawab ruang bank untuk menambah plafon kredit perumahan juga tidak terlalu besar. Sebab tingkat LDR bank saat ini (per Juli 2025) sudah mencapai 86%.

Terlepas dari adanya tantangan dalam mewujudkannya, program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo bukan hanya solusi terhadap masalah backlog perumahan, tetapi juga **strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional**. Dengan menggairahkan sektor properti, pemerintah menciptakan efek berganda ke berbagai sektor ekonomi lain, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sistem keuangan nasional. (***)



Berkomunikasi kepada Publik dengan Otentisitas untuk Membumikan Kebijakan Likuiditas

Oleh Eka Sri Dana Afriza

Setiap kali pemerintah mengumumkan kebijakan injeksi likuiditas ke sektor perbankan, reaksi publik dan pelaku pasar keuangan tidak pernah seragam.

Studi lintas negara selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa respons investor bank terhadap kebijakan prudensial sangat bervariasi. Pada awalnya, investor cenderung ragu karena ketidakpastian efektivitas intervensi pemerintah. Namun, ketika berbagai langkah cepat seperti pemangkasan suku bunga, injeksi likuiditas, dan skema penjaminan diperkenalkan, kebijakan ini relatif disambut positif sebagai mekanisme untuk menstabilkan pasar keuangan dan meredam gangguan ekonomi.

Meski demikian, tidak semua langkah diterima dengan antusias. Investor cenderung lebih kritis

terhadap relaksasi aturan prudensial, misalnya pelonggaran persyaratan modal atau kebijakan berbasis peminjam. Kebijakan semacam itu memang memberi kelonggaran jangka pendek, tetapi menimbulkan keraguan mengenai konsekuensi jangka panjang, terutama terkait kualitas aset perbankan dan keberlanjutan model bisnis.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa kebijakan likuiditas tidak bisa hanya diukur dari sisi teknis ekonomi atau regulasi, melainkan juga dari bagaimana narasi kebijakan tersebut dikomunikasikan ke publik dan investor. Dengan komunikasi yang tepat, intervensi pemerintah dapat dipersepsikan sebagai stimulus stabilisasi. Tanpa itu, kebijakan justru bisa menimbulkan keraguan, bahkan resistensi. Injeksi likuiditas bukan hanya persoalan moneter, tetapi juga persoalan narasi. Bagaimana pemerintah, regulator, dan industri perbankan mengkomunikasikan kebijakan ini akan menentukan

apakah publik memandangnya sebagai stimulus positif, atau justru menimbulkan ketidakpercayaan baru. Di sinilah peran komunikasi publik menjadi krusial.

Bicara manfaat, maka secara fundamental, injeksi likuiditas memiliki sejumlah manfaat nyata. Injeksi likuiditas menjaga fungsi intermediasi perbankan karena dengan tambahan likuiditas, bank tetap dapat menyalurkan kredit, khususnya ke sektor produktif. Akses pembiayaan bagi UMKM dan investasi juga bisa lebih terjamin. Di sisi lain, langkah ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pemerintah. Intervensi negara menunjukkan komitmen menjaga stabilitas, sehingga memperkuat sentimen pasar. Dengan kata lain, injeksi likuiditas bukan hanya "oksigen" bagi bank, melainkan juga stimulus ekonomi yang bisa berdampak luas ke masyarakat dan citra pemerintah. Namun, manfaat ini tidak otomatis dipahami publik.

Ada empat tantangan besar komunikasi publik dalam konteks ini:

Kompleksitas teknis – istilah seperti repo, intervensi moneter, atau likuiditas pasar sulit dipahami publik awam. Ketidakpastian hasil – publik sulit melihat dampak nyata dalam jangka pendek. Resiko mispersepsi – kebijakan bisa ditafsirkan sebagai "uang negara untuk bank", bukan stimulus ekonomi. Defisit kepercayaan – rendahnya trust terhadap lembaga keuangan/pemerintah membuat publik lebih mudah skeptis.

Tanpa strategi komunikasi yang baik, injeksi likuiditas bisa menimbulkan kegaduhan persepsi, yang

ironisnya berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri. Di sinilah teori komunikasi risiko (*Risk Communication Theory*) menjadi relevan. Teori ini menekankan bahwa dalam situasi penuh ketidakpastian, komunikasi harus transparan, konsisten, dan mampu membangun partisipasi.

Namun, selain transparansi dan konsistensi, otentisitas juga menjadi kunci. Penelitian komunikasi publik menunjukkan bahwa *audiens* lebih mudah percaya kepada komunikator yang dianggap *authentic*—yaitu menunjukkan sisi manusiawi, nilai, dan integritas personal di balik institusi. Dalam konteks injeksi likuiditas, ini berarti pejabat publik maupun pimpinan bank perlu menampilkan diri bukan sekadar sebagai teknokrat, melainkan juga sebagai individu yang peduli pada nasabah, UMKM, dan masyarakat luas. Bahasa yang personal, narasi berbasis pengalaman nyata, dan pengakuan terhadap risiko kebijakan dapat meningkatkan trust publik. Dengan pendekatan otentik, publik tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga merasakan niat baik yang mendasarinya.

Lebih jauh, konteks terbaru yang ditulis oleh analis pasar internasional Oliver Blake (2025) menyoroti bagaimana kebijakan injeksi likuiditas Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengandung implikasi strategis sekaligus risiko komunikasi publik. Pertama, fakta bahwa dana tersebut berbentuk deposit pemerintah di bank BUMN, bukan pinjaman atau hibah, penting untuk dijelaskan secara terbuka. Tanpa komunikasi yang jelas, publik bisa salah menafsirkan kebijakan ini sebagai *bailout bank*, bukan stimulus produktif. Kedua, Blake menekankan bahwa dana diarahkan ke UMKM, infrastruktur, dan konsumsi produktif.

Jika pesan ini tidak diperkuat ke publik, muncul risiko narasi negatif bahwa uang negara hanya berputar di lingkaran elit finansial.

Dalam hal ini, otentisitas komunikasi menjadi kunci: pejabat publik maupun pimpinan bank tidak cukup hanya menyajikan data teknis, tetapi juga harus mengakui risiko yang ada (misalnya potensi kredit macet/ NPL atau risiko inflasi) sekaligus menunjukkan komitmen bahwa mekanisme pengawasan ketat akan dijalankan. Dengan cara itu, publik akan melihat pemerintah dan perbankan bukan hanya sekadar aktor teknokratis, tetapi pihak yang benar-benar peduli pada keadilan distribusi manfaat. Otentisitas di sini berarti menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang membumi, jujur tentang tantangan, dan sekaligus konsisten menekankan arah positif: mendorong kredit produktif, membuka lapangan kerja, serta mendukung UMKM.

Transparansi penggunaan dana dan dampak riil ke masyarakat perlu untuk ditekan lewat narasi yang tegas. Transparansi penting guna mencegah kritik bahwa langkah ini merupakan moral hazard. Dalam menjaga konsistensi dan membangun partisipasi, bingkai yang positif perlu dijaga. Injeksi likuiditas harus dikomunikasikan sebagai langkah *pro-growth*—mendorong kredit produktif, UMKM, dan lapangan kerja.

Pemerintah dan regulator juga perlu menekankan bahwa ini bukan bailout, melainkan intervensi sementara dengan mekanisme kontrol dan pengawasan ketat. Dengan framing yang tepat, kebijakan bisa diterima sebagai stimulus pembangunan, bukan sekadar penyelamatan bank.

Komunikasi publik tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

dan regulator. Industri perbankan juga memiliki peran penting. Perbankan bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga "juru bicara" yang bisa memperkuat atau justru melemahkan persepsi publik. Transparansi, konsistensi, dan partisipasi perlu didorong oleh bank. Kepada nasabah, bank perlu menjelaskan bahwa tambahan likuiditas digunakan untuk mendukung kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha. Bank perlu menarasikan keberhasilan dengan menunjukkan data konkret penyaluran kredit dari dana likuiditas. Kolaborasi pemerintah, OJK, dan perbankan diperlukan agar pesan yang sampai ke publik konsisten, tidak tumpang tindih.

Injeksi likuiditas adalah kebijakan penting, tetapi efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh desain moneter atau fiskal. Sebagian efektivitasnya ditentukan oleh bagaimana publik memahaminya. Dengan pendekatan komunikasi risiko yang transparan dan framing narasi yang tepat, pemerintah bersama industri perbankan dapat menjaga kepercayaan publik. Pada akhirnya, keberhasilan injeksi likuiditas bukan sekadar menjaga stabilitas bank, melainkan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi

Blake, O. (2025) Indonesia's Strategic Liquidity Injection and Its Implications for State Bank Stocks and Economic Growth. <https://www.ainvest.com/news/indonesia-strategic-liquidity-injection-implications-state-bank-stocks-economic-growth-2509/>

Bobiceanu, A. M., Nistor, S., & Ongena, S. (2025). Banks' Stock Market Reaction To Prudential Policy Announcements. The Role Of Central Bank Independence And Financial Stability Sentiment. The Role Of Central Bank Independence And Financial Stability Sentiment (January 09, 2025). Swiss Finance Institute Research Paper, (25-11).

Saffran, L., Hu, S., Hinnant, A., Scherer, L. D., & Nagel, S. C. (2020). Constructing and influencing perceived authenticity in science communication: Experimenting with narrative. *PloS one*, 15(1), e0226711.

Menavigasi Arah Purbayanomics: Injeksi Rp200 Triliun ke Perbankan

Oleh Dzulfian Syarifan



Kebijakan perdana Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menginjeksi dana sebesar Rp200 triliun ke bank-bank BUMN (Himbara) langsung mendapatkan atensi luas publik. Sehari setelah Beliau dilantik, Menkeu memindahkan dana Pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia, lalu direlokasi ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI dengan besaran berbeda-beda.

Dalam siaran persnya, Menkeu menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah ingin meningkatkan fungsi intermediasi

perbankan dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan prioritas Pemerintah seperti perumahan, pangan, dan infrastruktur desa. Kebijakan ini juga menjadi bagian integral dari Program Paket Stimulus Ekonomi 2025 yang menargetkan penciptaan jutaan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya beli.

Justifikasi dan Desain Kebijakan

Secara konseptual, langkah ini menandai pergeseran orientasi fiskal Indonesia dari pendekatan

konservatif ala Sri Mulyani yang cenderung business as usual (BAU), menuju kebijakan ekspansif-agresif ala Purbayanomics. Dalam perspektif ekonomi makro klasik, Milton Friedman dan Anna Schwartz (1963) menunjukkan bahwa injeksi likuiditas merupakan instrumen kunci untuk mengatasi stagnasi ekonomi melalui peningkatan uang beredar dan mengerek permintaan agregat yang sedang melemah. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Bernanke dan Gertler (1995), yang menegaskan bahwa transmisi kebijakan moneter tidak hanya terjadi melalui suku bunga, tetapi juga melalui jalur kredit yang bergantung pada kapasitas dan insentif perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini dimaksudkan sebagai dorongan *counter-cyclical* untuk memperkuat intermediasi perbankan, meningkatkan pertumbuhan kredit menjadi *double digit*, dan memulihkan konsumsi rumah tangga serta investasi swasta yang sedang melemah dua tahun belakangan ini.

Di atas kertas, injeksi dana Rp200 triliun juga berpotensi menurunkan *cost of fund* dan memperbaiki efisiensi sistem keuangan. Tentu tergantung syarat dan ketentuan berlaku. Di sisi suplai kredit, tambahan likuiditas semestinya menurunkan biaya dana, sehingga

memungkinkan bank menurunkan suku bunga kredit, dan meningkatkan kapasitas pembiayaan pada sektor-sektor produktif dan prioritas Pemerintah. Di sisi permintaan kredit, penurunan biaya dana seperti ini akan meningkatkan permintaan pembiayaan. Alhasil, perekonomian akan berangsur pulih, bak tubuh sakit mendapatkan asupan gizi dan vitamin tambahan.

Lantas apa syarat dan ketentuan berlakunya? Beck, Levine, dan Loayza (2000) menekankan bahwa intervensi ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, selama disertai dengan tata kelola dan efisiensi intermediasi yang baik. Oleh karena itu, desain kebijakan turunan dari injeksi likuiditas ini menjadi penting: bagaimana alokasi dana tersebut dapat menyasar berbagai program-program produktif serta mekanisme pengawasan dana tersebut juga perlu diperhatikan jika kebijakan ini mau berjalan secara efektif.

Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana kita mendesain kebijakan lanjutan program ini? penelitian Juda Agung (2000) menunjukkan bahwa dampak penambahan/pengurangan suplai uang di Indonesia tidak berdampak ke semua bank secara rata. Bank-bank besar yang didominasi oleh BUMN relatif lebih bisa menyalurkan pinjaman karena akses mereka yang luas terhadap berbagai sumber pendanaan. Di sisi lain, bank-bank kecil yang aksesnya lebih terbatas justru paling terdampak ketika suplai uang diperketat; mereka akan paling mengerem kredit ketika kondisi ini terjadi. Jadi, secara desain kebijakan, terdapat dilema yang dihadapi Pemerintah.

Di satu sisi, bank-bank kecil yang didominasi oleh swasta justru yang paling membutuhkan injeksi likuiditas seperti ini, Pemerintah tidak memiliki akses langsung ke mereka. Di sisi lain, Himbara meskipun sebetulnya memiliki kondisi dana yang lebih melimpah, tetapi justru yang mendapatkan injeksi Rp200 triliun

ini karena Pemerintah punya kuasa langsung ke mereka. Maka, kebijakan berikut yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana Pemerintah dapat merancang mekanisme agar bank-bank kecil dan swasta dapat ikut menikmati likuiditas tambahan ini sehingga mereka juga dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan suplai kredit yang akhirnya akan menyukseskan kebijakan injeksi likuiditas ini.

**Regulator
dapat
memfasilitasi
kerja sama
antarbank
(interbank
cooperation) di
mana Himbara
menyalurkan
sebagian
likuiditas
berlebihnya
ke bank-bank
kecil.**



Solusi yang dapat didorong adalah dengan mendorong skema "*liquidity sharing*" antarbank. Regulator dapat memfasilitasi kerja sama antarbank (*interbank cooperation*) di mana Himbara menyalurkan sebagian likuiditas berlebihnya ke bank-bank kecil, bisa melalui: (a) skema repo bilateral, (b) Interbank market yang



lebih aktif dan kuat agar biaya dana antarbank menurun dan transmisi likuiditas melalui kredit menjadi lebih efisien dan efektif. Dua skema yang dapat dilakukan adalah, pertama *"on-lending"* di mana Himbara meminjamkan akses dana tersebut kepada bank kecil, lalu bank kecil menyalurkannya ke debitur akhir. Kedua, *"channeling"*, yaitu Himbara menyalurkan kredit langsung dengan menggunakan jaringan dan data nasabah milik bank kecil sebagai perantara (*co-lending*).

Agar skema ini berjalan efektif, tiga prinsip utama tata kelola harus dijalankan. Pertama, transparansi dan pengawasan *real-time* perlu dijamin melalui sistem pelaporan terpadu antara *stakeholders*, sehingga setiap aliran dana dapat dilacak dan dinilai dampaknya. Kedua, risk-sharing dan penjaminan yang terstruktur wajib diterapkan agar risiko kredit tidak hanya ditanggung oleh satu pihak,

melainkan dibagi proporsional. Hal ini mungkin dilakukan melalui skema penjaminan lembaga yang menanggung sebagian risiko gagal bayar. Ketiga, kepastian hukum dan koordinasi lintas lembaga harus diperkuat melalui peraturan turunan dan mekanisme koordinasi formal antar-*stakeholders* untuk memastikan bahwa tujuan utama kebijakan dapat tercapai.

Tanpa itu, seperti yang diprediksi oleh Tobin (1969), ketika bank memiliki likuiditas berlebih dan menghadapi risiko ketidakpastian atau permintaan kredit lemah, mereka cenderung melakukan substitusi portofolio dengan menempatkan dana berlebih tersebut pada aset-aset pasar keuangan yang aman tetapi cuan seperti SBN atau SRBI, ketimbang ekspansi kredit.

Fenomena ini sebetulnya sudah terjadi di Indonesia belakangan

ini, di mana akses likuiditas perbankan ditaruh di SBN atau SRBI akibat tingginya imbal hasil yang ditawarkan; di sisi lain terjadi penurunan permintaan kredit akibat penurunan daya beli masyarakat dan rendahnya ekspektasi ekonomi. Jangan sampai, tambahan likuiditas dari Menkeu Purbaya justru akan kembali ke pasar surat berharga, bukan ke sektor riil.

Jika hal ini dibiarkan, kebijakan Rp200 triliun hanya akan menciptakan likuiditas semu di mana uang justru kembali masuk kandang ke pasar keuangan, tetapi sektor riil tetap lesu. Jika terjadi, tentunya ini adalah bukan akhir cerita yang diinginkan oleh kita semua. Karena sejatinya, kebijakan ini bukan soal seberapa besar uang yang disuntikkan ke bank, melainkan seberapa jauh uang itu mengalir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Referensi

- Agung, J. (2000). Financial deregulation and the bank lending channel in developing countries: The case of Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/1467-8381.00063>
- Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000). Finance and the sources of growth. *Journal of Financial Economics*, 58(1–2), 261–300. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00072-6](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00072-6)
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27–48. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27>
- Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A monetary history of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691003542/a-monetary-history-of-the-united-states-1867-1960>

Jalan Panjang dari Injeksi ke Investasi: Mendorong Peran Nyata Perbankan

Pemerintah mengalihkan dana sebesar Rp200 triliun dari Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional. Langkah ini menjadi sinyal positif di tengah tekanan global seperti geopolitik, suku bunga tinggi, dan fluktuasi harga komoditas. Injeksi likuiditas ini diharapkan mampu menggerakkan sektor riil dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Data Bank Indonesia per Juli 2025 mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 8,3% (yoy), namun ruang akselerasi, khususnya di sektor produktif, masih terbuka lebar. Dana ini tidak hanya menjaga likuiditas tetap longgar, tetapi juga mendorong penyaluran kredit yang inklusif, sehat, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dari Dana Tidur ke Likuiditas Aktif

Selama ini, dana pemerintah di BI bersifat pasif. Melalui kebijakan baru, pemerintah mendorong agar dana tersebut berfungsi sebagai likuiditas aktif yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan likuiditas membuka peluang pembiayaan lebih luas, terutama ke sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi seperti:

Pertanian – menopang ketahanan pangan,
Energi terbarukan – mendorong transisi hijau,
Logistik dan transportasi – memperlancar distribusi,
Manufaktur – penggerak PDB dan penyerapan tenaga kerja.

Namun, konversi dana menjadi investasi produktif tidak terjadi otomatis. Diperlukan kesiapan dari sisi perbankan (supply) dan pelaku usaha (demand). Bank harus menjaga prinsip kehati-hatian, sementara pelaku usaha perlu ditopang dengan literasi keuangan, insentif, dan ekosistem yang produktif.

Perbankan sebagai Penggerak Pertumbuhan

Momentum ini menjadi peluang strategis bagi perbankan untuk memperluas kontribusi pembangunan. Dengan pengelolaan yang tepat, injeksi likuiditas bisa mendorong ekspansi kredit yang sehat, menguatkan UMKM, dan memperluas akses pembiayaan di wilayah yang belum terlayani.

Tantangan yang harus dikelola:

Menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan kualitas aset,
Mempercepat proses kredit dengan teknologi dan pendekatan berbasis risiko,
Memperkuat SDM dan sistem informasi untuk mitigasi risiko digital,
Menyesuaikan produk dan model bisnis agar lebih inklusif bagi UMKM.

Tantangan ini sekaligus menjadi peluang transformasi digital, struktural, dan relasional bagi bank.

Arah Kebijakan: Sinkronisasi dan Kolaborasi

Agar likuiditas berdampak maksimal,

perlu sinergi kebijakan lintas sektor. Pemerintah, BI, OJK, dan kementerian teknis harus memastikan bahwa:

Kebijakan fiskal dan moneter selaras,
Sektor prioritas mendapat insentif dan pendampingan,
Infrastruktur data dan digitalisasi perbankan diperkuat.

Kolaborasi juga harus mencakup peningkatan literasi keuangan masyarakat dan penguatan mitigasi risiko, agar ekspansi kredit berlangsung cepat dan berkelanjutan.



Dari Dana ke Dampak Nyata

Besarnya dana hanyalah awal. Dampak nyata tercipta saat dana mengalir tepat sasaran, membuka akses, memicu investasi, dan memperkuat fondasi ekonomi. Perbankan tak lagi sekadar pengelola dana, tetapi menjadi arsitek pertumbuhan yang inklusif, tangguh, dan berorientasi masa depan.

Bersama, kita dapat memastikan setiap rupiah yang diinjeksikan hari ini menjadi fondasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

PRIME 2025

Navigating Economic Headwinds: Responding to Weakening Consumption

PERBANAS sukses menyelenggarakan forum pertengahan tahun bertajuk “PRIME 2025 - Navigating Economic Headwinds: Responding to Weakening Consumption”, yang berfokus pada isu pelemahan daya beli masyarakat dan implikasinya terhadap perekonomian nasional.

Dalam forum ini, dipaparkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa sektor perbankan tetap tangguh di tengah tekanan global, namun diperlukan strategi adaptif dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Forum ini mempertemukan regulator, ekonom, dan pelaku industri guna memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan sektor keuangan dan mendorong transformasi ekonomi yang inklusif.

Perbankan	15,3	-6,9	11,0	27,9	49,0	48,1
Manufaktur	15,2	-4,2	2,9	6,5	13,3	6,1
Retail	47,9	-15,8	0,9	10,6	18,7	24,8
Perorangan	3,3	8,4	7,0	19,8	38,3	11,6
Saluran Dana	25,8	-12,5	29,0	2,9	0,4	-9,2
Saluran Lainnya	8,8	28,1	1,2	-4,1	-17,0	-38,9



PERBANAS Talkshow

Perbankan dan Investasi: Sinergi untuk Masa Depan Keuangan Indonesia



PERBANAS Daerah Jambi mengadakan Talkshow dengan tema “Perbankan dan Investasi: Sinergi untuk Masa Depan Keuangan Indonesia” pada 20 September 2025. Pembicara dalam kesempatan tersebut adalah perwakilan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Mirae Asset. Acara ini dihadiri perwakilan dari bank-bank anggota PERBANAS di Jambi.

CFO Forum PERBANAS II 2025

CFO Forum PERBANAS II 2025 sukses digelar di Semarang dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

Forum ini menjadi wadah para CFO dan eksekutif perbankan untuk saling menginspirasi, memperluas perspektif, dan memperkuat jejaring strategis di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Bukan hanya soal angka, CFO masa kini hadir sebagai pemimpin perubahan, yang mendorong transformasi digital, membangun talenta unggul, dan mempersiapkan perbankan menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.





POTONGAN BIAYA 25%

*Untuk Alumni yang Melanjutkan
Jenjang Magister (S2) di Perbanas Institute*

Program Pascasarjana dan Profesi

- Magister Manajemen • Magister Akuntansi
- Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)

Kenapa harus di Perbanas Institute?

- Kelas fleksibel (Weekend & Malam)
- Dosen dari Kalangan Profesional & Praktisi
- Jejaring Luas di Dunia Industri

PENDAFTARAN:



admi.perbanas.id

Info lebih lanjut:



0851 1752 3803

Edu Konsultan Pascasarjana Perbanas Jakarta



0851 7985 3806

Edu Konsultan Pascasarjana Perbanas Bekasi